

IMPLEMENTASI KARTU TANI DALAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI DESA BENTENG PALIOI KABUPATEN BULUKUMBA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH

Nurelvia Trisna Ayu,¹ Musyfikah Ilyas,² Istiqamah³

^{1,2,3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: nurelviatrisnaayu28@gmail.com¹

Abstract

This study aims to describe the Implementation of Farmer Cards in the Distribution of Subsidized Fertilizers in Benteng Palioi Village, Kindang District, Bulukumba Regency. In answering these problems, the author uses a normative syar'i approach and an empirical juridical approach. The method of data collection is done by way of interviews, observation, documentation, and literature study. The results showed that during the distribution of subsidized fertilizers using farmer cards, it was not implemented perfectly, because there were still many problems experienced by farmers in applying farmer cards, such as lack of service in card printing, lack of socialization which made it difficult for farmers to use farmer cards, and lack of farmer funds in activating farmer cards and these cards have not been distributed evenly. Supporting and inhibiting factors faced by farmers in the field in the implementation of farmer cards are supporting factors that can facilitate distributors in preparing reports, and can obtain fertilizer easily, but this farmer card also has obstacles in its application, namely the lack of good coordination between farmer groups and distributors, the limited ability of farmers to access program services. Basically, Siyasaah Syar'iyyah's view of implementing farmer cards in the distribution of subsidized fertilizers is that the government must be more responsible and must uphold the values of justice and the government must do its job well in making policies that will bring benefit to its people.

Keywords: Farmer Card; Subsidized Fertilizer; Siyasaah Syar'iyyah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kartu Tani Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan normatif syar'i dan pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani, tidak terimplementasi secara sempurna, dikarenakan masih banyak problemalitis yang dialami para petani dalam pengaplikasian kartu tani, seperti kurangnya pelayanan dalam percetakan kartu, kurangnya sosialisasi yang membuat para petani rumit dalam menggunakan kartu tani, serta kurangnya dana petani dalam mengaktifkan kartu tani dan

kartu tersebut belum terdistribusi dengan merata. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh para petani dilapangan dalam implementasi kartu tani yaitu faktor pendukung dapat memudahkan penyalur dalam penyusunan perencanaan laporan, dan dapat memperoleh pupuk dengan mudah, namun kartu tani ini juga memiliki hambatan dalam penerapannya yaitu kurangnya koordinasi yang baik antar kelompok tani dan penyalur, keterbatasan kemampuan petani dalam mengakses layanan program. Pada dasarnya, pandangan *Siyasah Syar'iyah* terhadap implementasi kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi memberikan kesejahteraan dan perlindungan petani dalam penerapan regulasi yang merugikan petani harus diubah agar pemerintah dan petani tidak saling merugikan. Agar kebijakan tersebut mendatangkan kemaslahatan bagi umatnya.

Kata Kunci: Kartu Tani; Pupuk Bersubsidi; *Siyasah Syar'iyah*.

PENDAHULUAN

Pertanian yaitu suatu sumber kehidupan manusia dan merupakan salah satu sektor atau lingkungan yang dapat menjanjikan bagi suatu perekonomian Indonesia.¹ Sektor pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, pemerintah telah merespon hal tersebut pada setiap periode, menjadikan pertanian sebagai prioritas utama dalam pembangunan mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.² Pengelolaan pembangunan pertanian yang baik juga akan mampu mendorong pertumbuhan dengan tetap menjaga pemerataan ekonomi,³ mengatasi kemiskinan dan sedapat mungkin menyejahterakan rakyat Indonesia, khususnya masyarakat petani sehingga mampu memenuhi kebutuhan manusia.⁴ Pemerintah di setiap negara harus menentukan langkah serius untuk mengatasi hal tersebut seperti mengeluarkan beberapa kebijakan agar pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat.⁵

Pembangunan pertanian di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pemberian subsidi sarana produksi pertanian dan penerapan

¹ Usman Jafar And Patimah Patimah, "Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif *Siyasah Syar'iyah*," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 2 (2022): 33-423.

² Asriana Asriana And Usman Jafar, "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 1 (2021): 28-40.

³ Muh Ahmadi And Subehan Khalik Umar, "Studi Kritis Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Di Kabupaten Mamuju Tengah (Telaah *Siyasah Syar'iah*)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2020): 53-139.

⁴ Andi Firda, Kurniati Kurniati, And Budiarti Budiarti, "Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Perspektif *Siyasah Syar'iyah*," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 3, no. 1 (2022): 32-121.

⁵ Daniati and Hisbullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Pendayagunaan Minyak Bumi," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 54-67.

teknologi baru sehingga mampu meningkatkan hasil pertanian.⁶ Salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan produksi, jumlah dan hasil produksi pertanian adalah pupuk. Kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah tentunya sudah melakukan perencanaan kajian yang matang sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana.⁷ Kebijakan biasanya dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan negara dan fungsinya dalam pengelolaan pemerintahan sehingga membentuk kebijakan.⁸ Menurut Carl Friedrich yang dikutip dari Wahab kebijakan adalah sesuatu yang diajukan oleh untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.⁹ Kebijakan pupuk bersubsidi telah diatur dan tertuang dalam Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan.¹⁰ Dalam penyaluran alokasi pupuk bersubsidi tentunya harus memenuhi prinsip 6 Tepat diantaranya tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu, hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.¹¹

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian telah mengeluarkan Kebijakan Program Kartu Tani. Dalam pasal 17 ayat 2 Permentan No. 10 Tahun 2020 tentang Pengalokasian dan HET (Harga Eceran Tertinggi) Pupuk Bersubsidi di Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2020, fokusnya pada penggunaan Kartu Tani (PERMENTAN NOMOR 01 TAHUN 2020).¹²

Bentuk perlindungan pemerintah terhadap petani menurut ketentuan UU No. 19 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani merupakan kerangka pelaksanaan program Kartu Tani. Dengan landasan bentuk perlindungan dan

⁶ Anwar Syarif, "Analisis Pelayanan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Pertanian Di Kab. Pengaruh Program Keluarga Harapan Dan Kartu Prakerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perfektif Islam (Studi Kasus Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan)," *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2022): 81-170.

⁷ Rifky Mahesa Putra, "Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Masalahat," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 3 (2021): 66-551.

⁸ sandi Sandi and Andi Safriani, "Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 1 (2021): 17-208.

⁹ Carl J Friedrich, "Man and His Government," in *Man and His World/Terres Des Hommes* (University of Toronto Press, 2019): 20-109.

¹⁰ Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan.

¹¹ Nur Mufidah and Indah Prabawati, "Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo," *Publika* 6, no. 9 (2018): 2.

¹² Virda Syafrul Ainiyah, "Implementasi Program Kartu Tani Untuk Menjamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi Di Desa Tawar Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto" (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022): 33.

pemberdayaan pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.¹³

Kartu tani merupakan salah satu kebijakan yang menggunakan teknologi sebagai upaya untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat khususnya petani, khususnya pada penyediaan, pengawasan dan pendistribusian pupuk bersubsidi. 47/Permentan/SR.310/11/2018 Menteri Pertanian tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi di Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2019 pada pasal 13 ayat 2 dan 3, disebutkan bahwa: penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan kartu tani; Penerapan dukungan penyaluran pupuk dengan kartu tani telah dicontohkan di beberapa kabupaten/kota.¹⁴

Pemerintah daerah melalui penerapan aturan hukum harus menjadi landasan dalam melaksanakan semua urusan pemerintahan daerah.¹⁵ Pemerintahan baik akan memberikan kebijakan yang baik, tuntutan tersebut menjadi teramat penting, karena jikalau tuntutan mengenai kebijakan pemerintahan yang dikeluarkan tentang kebijakan kartu tani maka akan memberikan hasil yang maksimal agar pembagian pupuk bersubsidi bagi masyarakat secara merata.¹⁶ Hal inilah yang menjadi landasan pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk melaksanakan program kartu tani tersebut.¹⁷

Implementasi program kartu tani, pemerintah Bulukumba Muchtar Ali Yusuf telah bekerjasama dengan Kementrian Pertanian untuk menerapkan sistem penginputan Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (Erdkk) yang digunakan sebagai acuan pendistribusian pupuk bersubsidi di wilayah tersebut, (Erdkk) adalah formulir berbasis web dengan atribut tambahan termasuk nomor ID penduduk, jika data petani yang dimasukkan di Erdkk benar, akan diterbitkan kartu tani yang diverifikasi oleh bank, tetapi jika data di Erdkk juga tidak atau belum dikembalikan ke kantor secara elektronik.¹⁸

Dengan diberlakukannya program kebijakan tersebut diharapkan dapat

¹³ Muh Aqil Fatahillah and Andi Tenri Padang, "Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2 (2021): 13-402.

¹⁴ Rani Rani and Fatmawati Fatmawati, "Dinamika Politik Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Siyasa Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2 (2022): 83-272.

¹⁵ Asriana Asriana and Usman Jafar, "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 1 (2021): 28-40.

¹⁶ Budiasri Budiasri, Halimah Basri, and Abdul Rais Asmar, "Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar'iyah," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 1 (2022): 25-39.

¹⁷ Ainiyah, "Implementasi Program Kartu Tani Untuk Menjamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi Di Desa Tawar Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto." (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022): 36.

¹⁸ Kementrian Pertanian, "Keputusan Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian," dalam *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020* (Jakarta: Maret, 2020): 10-23.

memaksimalkan penyaluran pupuk bersubsidi (Urea, SP36, ZA, NPK, Organik), hal ini akan meningkatkan taraf hidup masyarakat terkhususnya pada bagian kelompok tani.¹⁹ Program kartu tani ini, dapat melibatkan petani, kios pengecer, pemerintah serta Bank yang berkaitan. Kartu tani tersebut dapat dipergunakan untuk membeli pupuk dikios pengecer resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Berbagai upaya yang terencana tentang hal pembangunan diperkenalkan dalam pemerintah desa.²⁰

Faktanya dalam lingkungan masyarakat saat ini, belum efisien terhadap kebijakan tersebut, penerapan kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi menjadi kendala bagi para petani khususnya di desa benteng palioi kecamatan kindang kabupaten bulukumba, penggunaan kartu tersebut masih belum sepenuhnya diterapkan oleh kelompok tani; banyak petani masih menggunakan fotokopi kartu KTP untuk mempercepat penyaluran pupuk, hal ini dikarenakan kurang aktifnya pihak pemerintah dan bank dalam percetakan kartu, serta petani merasa kebijakan tersebut masih menyusahakan masyarakat khususnya kelompok tani.

Selanjutnya, penulis berniat melakukan penelitian serta mengkaji mengenai sejauh mana, Implementasi Kartu Tani Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. Sebab, yang menjadi fokus penelitian kali ini ialah langkah apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).²¹ Adapun metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada dan pendekatan yang dilakukan dengan melihat gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian menggunakan pendekatan normative syar'i yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum islam, baik

¹⁹ U Maman, Iwan Aminudin, and Erisca Novriana, "Efektifitas Pupuk Bersubsidi Terhadap Peningkatan Produktivitas Padi Sawah," *Jurnal Agribisnis Terpadu* 14, no. 2 (2021): 96-176.

²⁰ Jamila Mifthahul Jannah and Halimah Basri, "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 2 (2020): 17-308.

²¹ Abdul Muharis, Kusnadi Umar, and Ilham Laman, "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 3 (2021): 50-537.

berasal dari al-Qur`an, al-Hadist, kaidah ushul fiqh dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan terkait Implementasi Kartu Tani Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Benteng Palioi Kabupaten Bulukumba.²² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian kali ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, studi pustaka.²³ Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan disimpulkan.²⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kartu Tani dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba

Kebijakan program kartu tani merupakan cara yang mudah dan tepat bagi masyarakat untuk mempermudah atau salin memudahkan dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Mengapa demikian, dikarenakan penyaluran pupuk bersubsidi sering terjadi kelangkaan dalam pembagiannya, tetapi dengan adanya kartu tani tersebut para petani akan lebih mengetahui jatah pupuk yang mereka dapatkan. Kartu tani adalah sebuah alat transaksi yang berupa kartu debit sebagaimana kartu ATM yang dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi. Kartu ini akan memudahkan para petani mendapatkan saluran pupuk bersubsidi dan berbagai fasilitas kredit usaha rakyat lainnya.

Adapun problematika yang dihadapi masyarakat sehingga menyebabkan tidak efektifnya kartu tani, diantaranya:

a. Kurangnya pelayanan percetakan kartu tani

Pelayanan yang baik merupakan ukuran dari keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Aktifnya suatu pelayanan dalam hal ini biasanya terdapat di dalam actor atau pelaksana kebijakan dimana mereka harus mampu melaksanakan kebijakan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan patuh dengan peraturan yang ada. Seperti yang dikatakan oleh Nursan salah satu petani yang belum mendapatkan kartu tani bahwa:

“Sejauh ini di desa benteng palioi hampir semua para petani belum menggunakan kartu tani, cuman ada beberapa yang sudah mendapatkan namun belum mengaplikasikannya, itu karena kurang aktifnya pihak bank dalam percetakan kartu,

²² Jonaedi Efendi and Jhoni Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris,” (Depok, Prenadan Media Grup, 2018): 151.

²³ Djoko Widagdho, “Ilmu Budaya Dasar,” (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1994): 20.

²⁴ Kusnadi Umar, “Pasal Imunitas Undang-Undang ‘Corona’ Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum 2*, no. 1 Juni (2020): 29-114.

saya harap pihak yang terkait lebih aktif lagi dan peduli dengan adanya kebijakan tersebut, karena para petani juga akan membutuhkan kartu tani untuk beberapa tahun kedepan dan saya mendapatkan informasi katanya petani yang punya kartu tani juga akan mendapatkan bantuan di tahun 2023 ini.”²⁵

Sikap yang baik, disiplin, tanggung jawab dan peraturan hukum yang ada ini sangat diperlukan dalam menjalankan sebuah kebijakan. Kebijakan penyediaan kartu tani dilaksanakan oleh pihak bank yang dituntut untuk teliti, disiplin, dan tanggung jawab. Pelayanan yang baik akan sangat berpengaruh sehingga mengurangi potensi kurangnya pemegang kartu tani bagi para petani.

b. Kurangnya sosialisasi penggunaan kartu tani

Hal tersebut berdasarkan wawancara dari salah satu pihak penyalur di desa benteng palioi kecamatan kindang Muhammad Syakir sebagai berikut:

“Program kartu tani ini sudah diterapkan namun belum sepenuhnya terealisasikan di kalangan para petani, dan petani yang sudah memiliki kartu tani juga kurang paham bagaimana cara menggunakan kartu tani dalam bertransaksi dibidang penyaluran pupuk, itu karena kurangnya sosialisasi dari berbagai pihak dalam mengaplikasikan kartu tani.”²⁶

Kartu tani juga belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih terdapat beberapa masyarakat khususnya petani yang belum tergabung dalam kelompok tani dan masih ada beberapa kelompok tani yang tidak aktif, artinya kelompok tani tersebut jarang melakukan pertemuan rutin sehingga jarang ada sosialisasi.

c. Kurangnya dana masyarakat dalam mengaktifkan kartu tani

Salah satu keterbukaan dan transparansi dalam menyebarluaskan informasi harus dikedepankan agar hak masyarakat mengetahui informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.²⁷ Seperti yang dikatakan oleh yusri selaku petani yang memiliki kartu tani namun belum di gunakan:

“Sebenarnya kartu tani ini bagus, tetapi sebagian petani juga mengeluhkan permasalahan dana dalam pengaktifan kartu tani, dikarenakan untuk dapat mengakses kartu tani harus terisi saldo berkisar 250 ribu rupiah, dan jika saldo tersebut tidak terisi selama 365 hari maka kartu tersebut dinyatakan tidak aktif dan para petani akan membuat ulang kartu dengan mengisi beberapa prosedur-prosedur kartu tani. Dan sampai sekarang hal tersebut menjadi kendala terbesar kelompok tani dalam menggunakan kartu tani semaksimal mungkin.”²⁸

²⁵ Nursan, Petani, Wawancara, Bulukumba, 3 April 2023.

²⁶ Muhammad Syakir, Penyalur, Wawancara, Bulukumba, 3 April 2023.

²⁷ Budiasri Budiasri, Halimah Basri, and Abdul Rais Asmar, “Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar’iyyah,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3, no. 1 (2022): 25–39.

²⁸ Yusri, Petani, Wawancara, Bulukumba, 4 April 2023.

Dengan demikian, hasil wawancara dan data-data sekunder yang telah dilakukan penulis terkait implementasi kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi di desa tersebut menunjukkan bahwasanya penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani tidak terimplementasi secara sempurna, dikarenakan banyaknya problematika yang dihadapi para petani dilapangan, dan program kartu tani yang telah dikeluarkan oleh menteri pertanian yang mana aturan ini menjadi landasan dari kebijakan tersebut berbanding terbalik dengan realita yang ada pada saat ini, hal ini menjadi kendala besar dalam penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga solusi yang dapat diberikan terkait kebijakan yang dikeluarkan yaitu seharusnya pihak pemerintah lebih memperhatikan para petani dengan cara meningkatkan sosialisasi terkait penggunaan kartu tani dan meminimalisir saldo, serta memperbaiki sistem pelayanan kartu tani.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengguna Kartu Tani dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba

Sektor pertanian merupakan salah satu faktor yang mendapatkan perhatian yang serius pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Sejauh ini, pemerintah telah berupaya mengimplementasikan berbagai program kebijakan untuk kesejahteraan petani di Indonesia, salah satunya yaitu program kartu tani. Kebijakan program kartu tani selama ini dirasa baik dan kurang baik dalam masyarakat khususnya seorang petani.

Pada kegiatan pelaksanaan program kartu tani untuk pemberdayaan, pastinya terdapat faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi berjalannya suatu program.

a. Faktor Pendukung Pengguna Kartu Tani Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Memudahkan penyalur dalam penyusunan perencanaan laporan. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Syakir selaku penyalur pupuk yang telah dipercayai oleh masyarakat sebagai penyalur dalam pengolaan pupuk:

“Program kartu tani yang dikeluarkan oleh pemerintah menurut saya sangat bagus, mengapa demikian karena bagi saya sebagai penyalur dengan adanya krtu tani saya tidak lagi membuat sebuah laporan secara manual, tetapi saya hanya mengumpulkan beberapa struk bukti pembayaran jika ada petani yang ingin membeli pupuk.”²⁹

Memudahkan para petani dalam memperoleh sebuah pupuk. Dikemukakan oleh Yusdar selaku petani yang memiliki kartu tani:

²⁹ Muhammad Syakir, Penyalur, Wawancara, Bulukumba, 3 April 2023.

“Dengan adanya kartu tani akan mempermudah masyarakat khususnya dalam bidang pertanian untuk pengambilan pupuk bersubsidi, dan kartu tani juga memiliki pengaruh yang sangat bagus, karena tidak langsung dengan uang tunai, tetapi hanya dengan menggunakan kartu tani untuk membeli pupuk dan juga penebusannya cepat.”³⁰

b. Faktor Penghambat Pengguna Kartu Tani Dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Kurangnya Koordinasi yang baik antar kelompok tani dan penyalur. Seperti yang dikatakan oleh Jumardi selaku ketua kelompok tani di desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

“Sejauh ini koordinasi yang diberikan oleh penyalur di desa ini masih kurang memuaskan karena, program kartu tani ini belum sepenuhnya tersalurkan dan petani yang sudah memiliki kartu tani juga kurang paham bagaimana cara menggunakan kartu tani dalam bertransaksi dibidang penyaluran pupuk.”³¹

Keterbatasan kemampuan petani dalam mengakses layanan program yang mana dapat disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah maupun usia petani respondend yang tergolong lansia, sehingga kebijakan dari penggunaan kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

3. Pandangan Siyash Syar’iyyah terhadap Implementasi Kartu Tani dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Desa Benteng Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba

Pada konteks siyash syar’iyyah program kartu tani mempunyai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan dan perlindungan petani dalam penerapan regulasi yang merugikan petani harus diubah agar pemerintah dan petani tidak saling merugikan. Dalam hal ini, pemerintah juga harus memiliki rasa tanggung jawab dan bertindak adil.

Penerapan kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi perspektif siyash syar’iyyah yaitu pengelola kartu tani khususnya pemerintah harus mempunyai kapasitas dibidang pertanian, menjunjung tinggi dasar hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan kebijakan tersebut kepada petani dan hal tersebut wajib dipenuhi karena menyangkut hajat orang banyak atau kepentingan Negara dan masyarakat.

Pemerintah sebagai penguasa wajib memberikan perlindungan berupa batuan seperti alat-alat pertanian, penunjang benih, pupuk, sarana, prasarana dan saran, serta memberikan penyuluhan pertanian kepada masyarakat petani sesuai dengan peraturan

³⁰ Yusdar, Petani, Wawancara, Bulukumba, 2 April 2023.

³¹ Jumardi, Ketua Kelompok Tani, Wawancara, Bulukumba, 2 April 2023.

perundang-undangan pertanian, Pemerintah juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan pemerintah harus melakukan tugasnya dengan baik dan membuat undang-undang dan kebijakan yang seadil-adilnya.

KESIMPULAN

Implementasi kartu tani untuk penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba belum optimal. Masalah utama termasuk pelayanan percetakan kartu yang kurang, sosialisasi yang minim, dan kendala dana untuk aktivasi kartu. Faktor pendukung seperti kemudahan perencanaan dan pengadaan pupuk bertentangan dengan hambatan seperti kurangnya koordinasi antara kelompok tani dan penyalur serta keterbatasan akses petani. Pandangan Siyasa Syar'iyah menyarankan agar regulasi yang merugikan petani diubah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan petani, sehingga kebijakan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Ahmadi, Muh, and Subehan Khalik Umar. "Studi Kritis Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (Rtrw) Di Kabupaten Mamuju Tengah (Telaah Siyasa Syar'iah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 1 (2020).
- Asriana, Asriana, and Usman Jafar. "Telaah Hukum Tata Negara Islam Atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 1 (2021).
- Budiasri, Budiasri, Halimah Basri, and Abdul Rais Asmar. "Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 1 (2022): 25–39.
- Daniati, D, and H Hisbullah. "Tinjaun Hukum Islam Terhadap Peran Pemerintah Dalam Pendayagunaan Minyak Bumi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2 (2021).
- Fatahillah, Muh Aqil, and Andi Tenri Padang. "Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2 (2021).
- Firda, Andi, Kurniati Kurniati, and Budiarti Budiarti. "Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 1 (2022).
- Jafar, Usman, and Patimah Patimah. "Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2 (2022).
- Jannah, Jamila Mifthahul, and Halimah Basri. "Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 2 (2020).
- Maman, U, Iwan Aminudin, and Erisca Novriana. "Efektifitas Pupuk Bersubsidi Terhadap Peningkatan Produktivitas Padi Sawah." *Jurnal Agribisnis Terpadu* 14, no. 2 (2021).

- Mufidah, Nur, and Indah Prabawati. "Implementasi Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani Di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo." *Publika* 6, no. 9 (2018).
- Muharis, Abdul, Kusnadi Umar, and Ilham Laman. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Sinjai." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 3 (2021).
- Putra, Rifky Mahesa. "Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Maslahat." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 2, no. 3 (2021).
- Rani, Rani, and Fatmawati Fatmawati. "Dinamika Politik Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 2 (2022).
- Sandi, Sandi, and Andi Safriani. "Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penetapan Peraturan Desa." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 3, no. 1 (2021).
- Syarif, Anwar. "Analisis Pelayanan Ekonomi Masyarakat Melalui Sektor Pertanian Di Kab. Pengaruh Program Keluarga Harapan Dan Kartu Prakerja Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Kel. Sei Kera Hilir I Kec. Medan Perjuangan Kota Medan)." *JKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 1 (2022).
- Umar, Kusnadi. "Pasal Imunitas Undang-Undang 'Corona' Dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Menetapkan Kerugian Negara." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 Juni (2020).

Buku :

- Widagdho, Djoko. "Ilmu Budaya Dasar," Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1994.
- Efendi, Jonaedi, and Jhoni Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris," 2018.
- Friedrich, Carl J. "Man and His Government." In *Man and His World/Terres Des Hommes*, 109–20. University of Toronto Press, 2019.

Skripsi :

- Ainiyah, Virda Syafrul. "Implementasi Program Kartu Tani Untuk Menjamin Ketersediaan Pupuk Bersubsidi Di Desa Tawar Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto." Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Peraturan

- Kementrian Pertanian, "Keputusan Direktur Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian," dalam *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2020* (Jakarta: Maret, 2020).

Wawancara:

- Nursan, Petani, Wawancara, Bulukumba, 3 April 2023.
- Muhammad Syakir, Penyalur, Wawancara, Bulukumba, 3 April 2023.
- Yusri, Petani, Wawancara, Bulukumba, 4 April 2023.
- Yusdar, Petani, Wawancara, Bulukumba, 2 April 2023.
- Jumardi, Ketua Kelompok Tani, Wawancara, Bulukumba, 2 April 2023.
- Muhammad Amir, Petani, Wawancara, Bulukumba, 2 April 2023.